

**TESIS**

**KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
TANJUNG PATI**



**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

# **KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI**

(Nazif Firdaus, 1720112048, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 137 halaman, 2019)

## **ABSTRAK**

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana selalu meningkat jumlahnya. Saat ini, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika oleh anak sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini dilaksanakan melalui pengupayaan diversi. Diversi menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang SPPA merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam rangka mengusahakan pelaksanaan diversi yang lebih baik, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam pelaksanaannya jusru membuat ketidakpastian hukum berkaitan dengan pengupayaan diversi terhadap anak. Dalam kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, terdapat 2 perkara tindak pidana narkotika anak. Salah satu perkara diselesaikan melalui upaya diversi, sedangkan terhadap perkara yang lain tidak ada pertimbangan untuk pengupayaan diversi. permasalahan dalam Tesis ini adalah: 1) bagaimanakah kepastian hukum terhadap pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika? 2) bagaimanakah pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1. Penerbitan Perma Diversi Anak yang hanya mengharuskan hakim untuk melakukan upaya diversi dengan tidak melakukan konsolidasi dengan pengak hukum yang lain membuat ketidakpastian hukum dan merusak hakekat dari sistem peradilan pidana anak. 2. Pertimbangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam pengupayaan diversi terhadap anak hanya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan tidak mempunyai pedoman lain. Sedangkan pertimbangan hakim didasarkan kepada keyakinan hakim terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan anak, hakim menilai peranan anak dalam tindak pidana yang dia lakukan. Untuk perbaikan penegakan hukum di masa depan Mahkamah Agung perlu berkonsolidasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk membuat peraturan bersama berkaitan dengan diversi tersebut mengingat dan menimbang berlakunya secara optimal sistem peradilan pidana anak.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Diversi, Tindak Pidana Narkotika.

**THE LEGAL CERTAINTY OF THE IMPLEMENTATION OF  
DIVERSION ON THE CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW IN  
NARCOTICS CRIME IN TANJUNG PATI DISTRICT COURT'S  
JURISDICTION**

(Nazif Firdaus, 1720112048, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
137 Pages, 2019)



Criminal act committed by children increased in number every year, including narcotics crime. The misusing of the drugs and the illicit trafficking done by the children has reached an alarming point. To prevent these children face the legal procedure, diversion is one of the way. According to Article 1 Number 7 of the Juvenile Justice System Act (Undang-Undang SPPA), diversion is a transfer of the settlement of child cases from criminal justice process to a process outside that. In order to make a better implementation of diversion, the Supreme Court issued a Supreme Court Regulation (Perma) Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Justice System. However, the implementation instead made a legal uncertainty related to the attempt to implement the diversion. Among the cases related to narcotics crime that occurred in Tanjung Pati District Court's Jurisdiction, two of them are juvenile narcotics crime. One of the cases was resolved through diversion, while there was no consideration for diversion for the other one. This article gives an insight about the legal certainty and the considerations of investigators, prosecutors and judges regarding the implementation of diversion on the children in conflict with law in narcotics crime. The approach method used is a sociological juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the research show that : 1) The Issuance of Diversion of Children Regulation by Supreme Court which only requires judges to undertake diversion by not consolidating with other law enforcers makes legal uncertainty and damages the nature of the juvenile justice system. 2) The consideration of the Investigator and Prosecutor in the implementation of diversion on children only based on Article 7 Paragraph (2) of the Juvenile Justice System Act and does not have other guidelines. Whereas the judge's consideration is based on the judge's belief, assessing the role of the child in a crime they committed. To improve law enforcement in the future, the Supreme Court needs to consolidate with the Police and the Attorney General's Office to make joint regulations relating to the diversion, considering the optimal application of the juvenile justice system.

**Keywords :** Legal Certainty, Diversion, Narcotics Crime.